

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Ambon

Kondisi perekonomian di Kota Ambon dipengaruhi oleh kondisi lokal, maupun kondisi eksternal seperti perekonomian Maluku dan Nasional.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Ambon Tahun 2014, dan Perkiraan Tahun 2015

1. Struktur Ekonomi

Mulai tahun 2015, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menggunakan tahun dasar 2010, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Karena itu data PDRB Kota Ambon tahun 2010 sampai 2014 yang digunakan sekarang telah menggunakan tahun dasar 2010, yang mengalami penyempurnaan dalam konsep dan defenisi, termasuk juga perubahan cakupan untuk setiap 'sektor', dimana istilah yang digunakan sekarang bukan lagi 'sektor' tapi 'kategori'.

Terkait dengan itu, maka struktur ekonomi Kota Ambon berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 adalah sebagaimana Tabel III.1, yang didominasi oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan kontribusi sebesar Rp.1,685 triliun lebih (21,85%); dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 1,661 teriliun lebih (21,54%) bagi PDRB Kota Ambon.

Kategori lapangan usaha lain yang juga turut memberikan kontribusi bagi perekonomian Kota Ambon adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 840,6 milyar lebih (10,90%); Informasi dan komunikasi sebesar 681,7 milyar lebih (8,84%); Jasa Keangan dan Asuransi sebesar 519,4 milyar lebih (6,74%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 471,6 milyar lebih (6,12%); Jasa Pendidikan sebesar 397,9 milyar lebih (5,16%); dan Konstruksi sebesar 362,3 milyar lebih (4,70%). Selain itu terdapat beberapa kategori lain yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian kota Ambon, meskipun tidak basis, yaitu Industri Pengolahan (3,96%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,21%); Jasa Perusahaan (2,04%); Jasa Lainnya (2,01%); Jasa Kesehatan dan kegiatan social (1,14%); Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,98%); Real Estate (0,34%); Pertambangan dan Penggalian (0,27%), serta Pengadaan Listrik dan Gas (0,19%).

Tabel III.1. Kontribusi Setiap Kategori Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kondisi Tahun 2014

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	Jumlah Tahun 2014 (Rp. Juta) **)	Pro-sentasi	Peringkat Kontribusi PDRB
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,685,195.94	21.85%	1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,661,200.28	21.54%	2
H	Transportasi dan Pergudangan	840,667.92	10.90%	3
J	Informasi dan Komunikasi	681,712.48	8.84%	4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	519,468.09	6.74%	5
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	471,660.19	6.12%	6
P	Jasa Pendidikan	397,953.76	5.16%	7
F	Konstruksi	362,357.49	4.70%	8
C	Industri Pengolahan	305,715.09	3.96%	9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	247,564.07	3.21%	10
M, N	Jasa Perusahaan	157,185.55	2.04%	11
R, S, T, U	Jasa lainnya	154,716.40	2.01%	12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,226.40	1.14%	13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,945.15	0.98%	14
L	Real Estate	26,410.19	0.34%	15
B	Pertambangan dan Penggalian	20,542.13	0.27%	16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,673.23	0.19%	17
PDRB ADHK 2010		7,711,194.36		

***) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Kota Ambon Tahun 2015

Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah adalah penyumbang utama perekonomian di Kota Ambon disebabkan oleh peran kota Ambon sebagai pusat kegiatan nasional, sekaligus pusat pemerintahan di Provinsi Maluku, sehingga belanja pemerintahan dan belanja aparatur dari gaji Pegawai Negeri Sipil, dan TNI-POLRI tingkat Provinsi Maluku dan Kota Ambon dilakukan di kota ini.

Penyumbang utama kategori Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, adalah sub kategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya sebesar 16,25% terhadap Total PDRB. Sedangkan sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 5,30% terhadap total PDRB. Hal ini disebabkan

oleh peran Kota Ambon sebagai pintu gerbang masuknya barang dan jasa dari dan ke wilayah lain di Provinsi Maluku, Regional, dan Nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat dampak ikutan dari belanja kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan di kota ini.

Fenomena menarik yang ditemukan adalah maraknya dan tingginya sumbangan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya bagi perekonomian di Kota Ambon. Selain kebutuhan akan transportasi yang memadai, kepemilikan sepeda motor juga diduga telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat di Kota Ambon. Berdasarkan data UPTB Pendapatan Kota Ambon di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, maka jumlah kendaraan bermotor pada di Kota Ambon tahun 2014 adalah 166.696 unit, terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 22.009 unit (13,20%), dan kendaraan roda dua sebanyak 144.687 unit (86,80%). Jika dibandingkan jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2014, maka kepemilikan kendaraan roda dua di Kota Ambon cukup tinggi, yaitu 1 kendaraan bermotor roda dua untuk 2,8 orang, atau hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan roda dua. Fenomena ini tentunya dapat berdampak pada ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, jika tidak dikelola dengan baik.

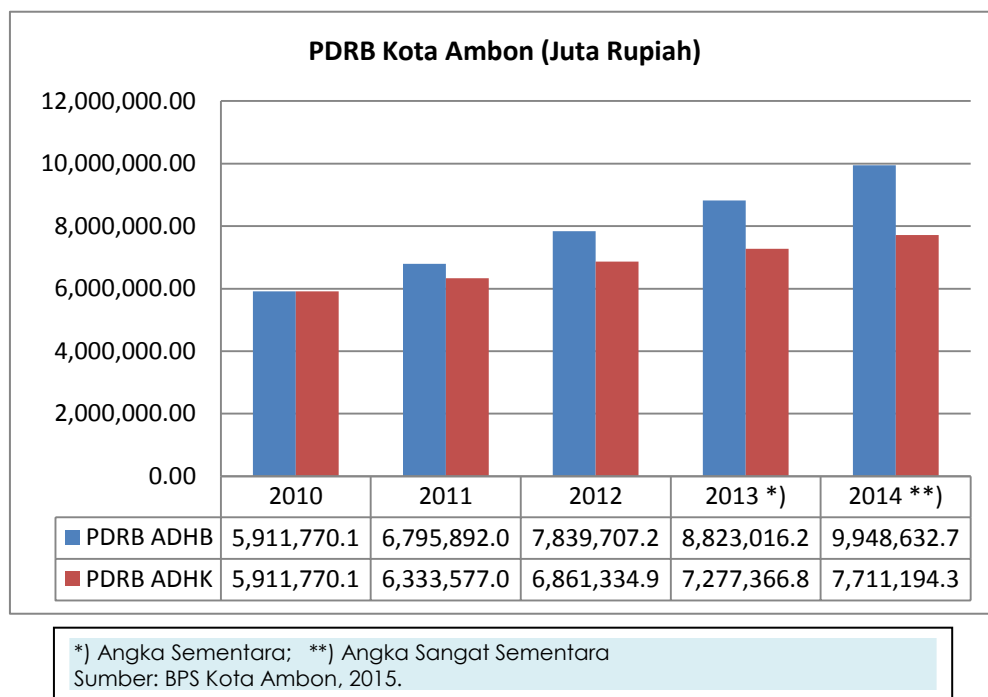
Secara keseluruhan perekonomian di Kota Ambon didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi (Tabel III.1), maka terdapat 5 aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan yang utama yaitu (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Transportasi dan Pergudangan, (4) Informasi dan Keuangan, serta (5) Jasa Keuangan dan Asuransi, yang secara keseluruhan menyumbang sebanyak 69,88% dari PDRB Kota Ambon. Beberapa aktivitas menunjang Kota Ambon sebagai kota jasa, juga tergambar dari kontribusi jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan social, dan jasa lainnya, yang mencapai 10,35% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi aktivitas jasa ke depan.

Jika mengamati struktur ekonomi Kota Ambon tahun 2014 yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2015, diperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2014, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan.

2. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Mulai tahun 2015, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menggunakan tahun dasar 2010, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Karena itu data PDRB Kota Ambon tahun 2010 sampai 2014 yang digunakan sekarang telah

menggunakan tahun dasar 2010, yang mengalami penyempurnaan dalam konsep dan defenisi, termasuk juga perubahan cakupan untuk setiap 'sektor', dimana istilah yang digunakan sekarang bukan lagi 'sektor' tapi 'kategori'.



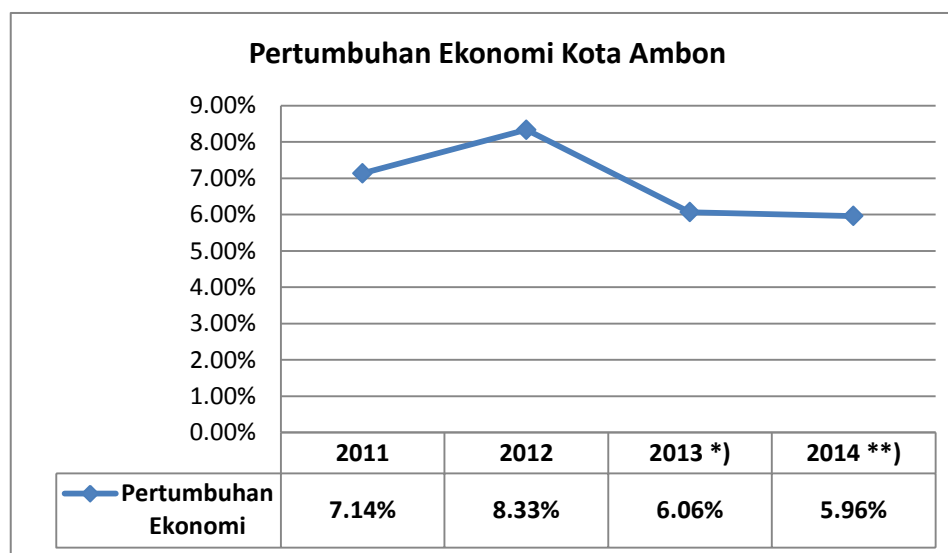
Gambar III.1. PDRB Kota Ambon Tahun 2010-2014

Perhitungan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010) terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan yang berkembang maju (Gambar III.1).

Pada tahun 2014, PDRB Kota Ambon atas dasar Harga Berlaku mencapai Rp.9,948 trilyun lebih, atau meningkat sebesar Rp.1,125 trilyun lebih (12,76%) dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp.8,823 trilyun lebih. Sementara itu, PDRB Kota Ambon tahun 2014 atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) mencapai Rp.7,711 trilyun lebih. PDRB atas dasar Harga Konstan ini meningkat sebesar Rp.433,8 milyar lebih (5,96%) dibanding tahun 2013 yang adalah Rp.7,277 trilyun lebih.

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, meskipun dalam 2 tahun terakhir cenderung melambat dari tahun 2012 (Gambar III.2). Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 8,33%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012, sangat

dipengaruhi oleh terlaksananya event-event nasional di Kota Ambon, seperti MTQ Tingkat Nasional, dan Pesparawi Mahasiswa Tingkat Nasional, yang mendorong masuknya investasi Pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana; serta mendorong berkembangnya bidang-bidang usaha pendukung untuk mensukseskan penyelenggaraan ini.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2014

Gambar III.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2011-2014

Pada tahun 2014, ekonomi Kota Ambon tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun lebih lambat dari pada tahun 2013, yaitu sebesar 5,96%. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 melambat dari tahun sebelumnya, namun semua kategori lapangan usaha tetap mengalami pertumbuhan yang positif, bahkan ada yang lebih tinggi, selain ada yang lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2013.

Beberapa kategori lapangan usaha di tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari tahun 2013 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,82% (sebelumnya 3,21%), Industri Pengolahan sebesar 8,14% (sebelumnya 6,32%), Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 30,54% (sebelumnya 4,03%), Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,29% (sebelumnya 2,67%), Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,52% (sebelumnya 6,57%), Real Estate sebesar 7,23% (sebelumnya 2,47%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 6,82% (sebelumnya 3,56%), Jasa Pendidikan sebesar 9,72% (sebelumnya 2,48%), Jasa Kesehatan sebesar 2,12% (sebelumnya 0,20%), dan Jasa Lainnya sebesar 5,93% (sebelumnya 0,22%). Pertumbuhan yang tinggi di kategori Pengadaan Listrik dan Gas, disumbangkan oleh pertumbuhan sub kategori ketenagalistrikan sebesar 30,78%. Hal ini dipengaruhi pula oleh berjalannya agenda Pemerintah Kota Ambon yaitu Ambon Terang di Malam

Hari, dengan pemasangan penerangan jalan umum dan lampu hias pada berbagai ruas jalan di Kota Ambon.

Sedangkan beberapa kategori yang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari tahun 2013 adalah Konstruksi sebesar 7,23% (sebelumnya 7,74%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 2,29% (sebelumnya 8,15%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa sebesar 4,31% (sebelumnya 8,85%), Informasi dan Komunikasi sebesar 7,63% (sebelumnya 9,54%), Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,35% (sebelumnya 8,53%), dan Jasa Perusahaan sebesar 4,98% (sebelumnya 7,30%). Kalau dicermati kategori yang mengalami penurunan pertumbuhan, maka penurunan terjadi pada kategori lapangan usaha Jasa-Jasa, yang adalah basis ekonomi Kota Ambon, sehingga turut memberikan sumbangan bagi penurunan ekonomi Kota Ambon tahun 2014.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada tahun 2014 selain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori lapangan usaha Jasa-Jasa, juga dipengaruhi oleh ekonomi regional Provinsi Maluku yang juga mengalami perlambatan pada Triwulan IV Tahun 2014. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Maluku Edisi Triwulan IV 2014 yang dilansir oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan IV 2014 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah dampak dari *high-base effect* yang terjadi pada triwulan IV 2013 disertai dengan faktor-faktor *downside* yang terjadi pada triwulan IV 2014. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku disebabkan dampak dari *high-base effect* yang terjadi pada triwulan IV 2013, dimana pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2013 tercatat sebesar 9,81% (y.o.y), jauh meningkat dibanding triwulan III 2013 yang sebesar 5,43% (y.o.y) dan triwulan II 2013 yang sebesar 2,03% (y.o.y), sehubungan dengan diselenggarakannya Pemilukada putaran kedua di Desember 2013. Selain itu, faktor *downside* yang terjadi pada triwulan IV 2014 turut menarik ke bawah perekonomian Kota Ambon dan Maluku, antara lain: kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bertahap, kenaikan harga barang dan/jasa sebagai dampak kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, serta faktor cuaca yang kurang mendukung untuk aktivitas melaut disertai gelombang tinggi yang terjadi selama triwulan IV 2014.

Mencermati kondisi ekonomi Kota Ambon pada tahun 2014, maka pada tahun 2015, perekonomian Kota Ambon diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, pada kisaran 5,7-7,0%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2015 didukung factor cuaca yang baik, tingginya tingkat konsumsi rumah tangga sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Gerakan Mangente Ambon dan perayaan HUT Kota Ambon ke 440 Tahun 2015, pelaksanaan Pesta Paduan

Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XI tahun 2015, serta masih berlanjutnya pembangunan proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2015 ataupun tahun depan, antara lain pembangunan Jembatan Merah Putih. Selain itu pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2015 juga dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga oleh adanya perayaan hari-hari besar keagamaan maupun nasional, serta pemanfaatan hari-hari liburan sekolah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Ambon Tahun 2016, dan Tahun 2017

Prospek perekonomian Kota Ambon pada tahun 2016 dan tahun 2017 diharapkan masih dalam pertumbuhan yang positif, pada kisaran 6,00 - 7,00%. Beberapa event penting yang diselenggarakan di Kota Ambon pada tahun 2016 seperti persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Informasi dan Komunikasi yang dapat memberikan efek ganda pada roda perekonomian Kota Ambon. Pada sisi lain, Dana Desa dari Pemerintah yang masuk ke rekening desa diharapkan turut membuat

Keberlanjutan proyek-proyek Pemerintah *multi-years* seperti Jembatan Merah Putih, Ambon Flood Management, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maupun infrastruktur dasar lainnya menjadi faktor pendorong pertumbuhan di kategori lapangan usaha jasa-jasa dan memicu perkembangan kategori-kategori lapangan usaha lainnya. Selain itu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan wilayah di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon sebagai implementasi Nawa Cita Kabinet Kerja. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan tahun 2016 di Kota Ambon antara lain peningkatan Sarana Prasarana Alat Rumah Sakit Rujukan Regional (RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon), pengembangan pelabuhan Ambon untuk Tol Laut, pembangunan dan penyediaan air baku, serta pembangunan kawasan perkotaan melalui pengembangan Kota Ambon sebagai kota otonomi sedang di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Kota Berkelanjutan.

Pada tahun 2017, kondisi seperti ini diharapkan masih terjadi, sehingga prospek perekonomian di Kota Ambon masih dalam pertumbuhan yang positif. Keberlanjutan proyek-proyek Pemerintah *multi-years* seperti Ambon Flood Management, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maupun infrastruktur dasar lainnya, serta penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak menjadi faktor pendorong pertumbuhan di kategori

lapangan usaha jasa-jasa dan memicu perkembangan kategori-kategori lapangan usaha lainnya. Pada sisi lain berkembangnya investasi swasta yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Rumah Sakit Siloam, diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon

Pada sisi lain, tantangan yang dapat dihadapi selama tahun 2016 dan 2017 sehingga dapat mengganggu roda perekonomian di Kota Ambon adalah cuaca yang ekstrim yang dapat memunculkan resiko bencana alam, seperti kekeringan ataupun hujan berkepanjangan, banjir maupun longsor. Hal ini dapat mempengaruhi dapat mengurangi produktivitas kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta roda ekonomi lainnya di Kota Ambon. Kebijakan nasional di bidang perikanan, khususnya diperpanjangnya moratorium izin penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat saja berdampak pada menurunnya ekspor perikanan yang menjadi komoditi utama pada sub kategori lapangan usaha perikanan.

Hal lain yang dapat juga mempengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2016 dan 2017 adalah persaingan ekonomi global Negara-negara di Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia Nations*) melalui melalui *ASEAN Economy Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kondisi ini diprediksikan dapat pula mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia, termasuk Kota Ambon, dengan terbukanya perdagangan dan persaingan bebas barang dan jasa antar Negara ASEAN.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Ambon

Arah kebijakan keuangan Kota Ambon untuk tahun 2016, khususnya proyeksi keuangan serta arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kota Ambon dan Kerangka Pendanaan

Berkaca kepada dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kota Ambon, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel III.2.**

Pada tahun 2016, pendapatan daerah Kota Ambon direncanakan sebesar Rp.1.172.167.934.194,-. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 16% dari target tahun 2015 yang sebesar Rp.1.007.282.959.96,-. Kontribusi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2016 ini disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 12%, Dana Perimbangan sebesar 68%, dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 20%. Sedangkan prakiraan maju pendapatan daerah untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.260.835.563.683,- atau meningkat 8% dari tahun 2016.

Sumbangan terbesar Dana Perimbangan bagi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2016 berasal dari Dana Alokasi Umum, yang diprediksikan sebesar Rp.682.687.269.000,- atau 58% pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2015 yang sebesar Rp.620.624.790.000,-. Komponen lain Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2016 adalah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.38.451.304.080,- atau 3%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.76.670.266.500,- atau 7%.

Pada sisi lain, belanja daerah Kota Ambon tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.159.464.164.988,-. Belanja ini mengalami kenaikan sebesar 13% dari target tahun 2015 yang sebesar Rp.1.024.645.252.229,-. Komponen belanja daerah tahun 2016 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.734.464.164.988,- atau 69%, dan Belanja Langsung sebesar Rp.425.000.000.000,- atau 31%. Sedangkan prakiraan maju belanja daerah untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.255.037.510.912,- atau meningkat 8% dari tahun 2016.

Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	JUMLAH					
		2012 3	2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8
1	PENDAPATAN	Rp 746,457,651,518	Rp 848,612,715,138	Rp 949,999,050,046	Rp 1,007,282,959,996	Rp 1,172,167,934,194	Rp 1,260,835,563,683
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 58,252,561,996	Rp 66,174,084,704	Rp 81,565,385,011	Rp 99,196,412,743	Rp 141,471,766,906	Rp 162,460,181,942
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	Rp 39,299,981,689	Rp 44,982,635,424	Rp 48,573,817,500	Rp 53,383,194,747	77,405,632,383	89,016,477,241
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 15,936,944,023	Rp 17,660,700,927	Rp 26,835,199,576	Rp 33,157,674,190	48,078,627,576	55,290,421,712
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	Rp 437,705,403	Rp 525,035,726	Rp 1,649,000,000	Rp 1,549,000,000	1,549,000,000	1,549,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 2,577,930,882	Rp 3,005,712,627	Rp 4,507,367,935	Rp 11,106,543,806	14,438,506,948	16,604,282,990
1.2	Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Rp 661,994,104,881	Rp 781,169,168,494	Rp 676,959,186,175	Rp 708,178,623,264	Rp 797,808,839,580	Rp 818,910,588,492
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 42,107,852,446	Rp 34,163,447,779	Rp 29,886,867,175	Rp 30,761,043,264	38,451,304,080	44,218,999,692
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp 1,525,403,435	Rp 916,740,653	-	-	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 497,388,862,000	Rp 551,507,941,000	Rp 601,627,489,000	Rp 620,624,790,000	682,687,269,000	682,687,269,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 29,219,550,000	Rp 49,531,570,000	Rp 45,444,830,000	Rp 56,792,790,000	76,670,266,500	92,004,319,800
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 91,752,437,000	Rp 117,997,096,000	Rp -	Rp -	Rp -	0
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0
	Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp 27,052,373,062	Rp -	Rp -	Rp -	0
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 26,210,984,641	Rp 1,269,461,940	Rp 191,474,478,860	Rp 199,907,923,989	Rp 232,887,327,707	Rp 279,464,793,249
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp 25,305,178,671	Rp 259,961,940	1,600,000,000	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Rp -	Rp -	Rp 25,932,151,200	Rp 29,932,151,200	37,415,189,000,00	44,898,226,800
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp 146,780,007,660	Rp 169,975,772,789	195,472,138,707,35	234,566,566,449
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 17,162,320,000	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	Rp 905,805,970	Rp 1,009,500,000	-	-	-	-
2	BELANJA	Rp 756,207,851,019	Rp 829,655,382,747	Rp 971,879,959,574	Rp 1,024,645,252,229	Rp 1,159,464,164,988	Rp 1,190,037,510,912
2.1	Belanja Tidak Langsung	Rp 535,499,760,987	Rp 587,882,115,627	Rp 617,352,718,124	Rp 707,031,507,709	Rp 734,464,164,988	Rp 765,037,510,912
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 517,069,547,948	Rp 566,980,732,071	Rp 595,068,454,024	Rp 686,859,277,018	714,333,648,099	742,906,994,023
2.1.2	Belanja Bunga	Rp 781,645,091	0	0	Rp 41,713,802	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp 123,400,000	Rp 123,400,000	123,400,000	123,400,000
2.1.4	Belanja Hibah	Rp 6,515,115,901	Rp 9,884,427,689	Rp 14,370,163,000	Rp 8,000,000,000	8,000,000,000	10,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2,812,719,830	Rp 3,430,149,425	Rp 2,440,701,100	Rp 2,915,060,100	2,915,060,100	2,915,060,100
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota/ Desa	Rp 3,428,200,000	Rp 2,062,310,000	Rp 2,850,000,000	Rp 7,092,056,789	7,092,056,789	7,092,056,789
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp 4,792,532,217	Rp 5,424,496,442	Rp 2,500,000,000	Rp 2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	Rp 220,708,090,032	Rp 241,773,267,120	Rp 354,527,241,450	Rp 317,613,744,520	Rp 425,000,000,000	425,000,000,000
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp 17,268,694,722	Rp 17,306,990,198	Rp 24,811,032,148	Rp 13,642,284,500	25,000,000,000	25,000,000,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 92,128,533,922	Rp 119,428,924,926	Rp 158,595,089,606	Rp 159,211,912,203	210,000,000,000	210,000,000,000
2.2.3	Belanja Modal	Rp 111,310,861,390	Rp 105,037,351,996	Rp 171,121,119,696	Rp 144,759,547,817	190,000,000,000	190,000,000,000

Lanjutan Tabel III.2		JUMLAH					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
NO	URAIAN						
1	2	4	5	6			8
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp (9,750,199,501)	Rp 18,957,332,391	Rp (21,880,909,528)	Rp (17,362,292,233)	Rp 12,703,769,206	Rp 5,798,052,772
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 33,364,535,269	Rp 10,756,405,137	Rp 24,713,737,528	Rp 20,942,292,233	Rp 7,500,000,000	Rp 12,703,769,206
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 22,124,535,269	Rp 10,751,905,137	Rp 24,713,737,528	Rp 20,942,292,233	7,500,000,000	Rp 12,703,769,206
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp 11,232,000,000	0				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp 8,000,000	4,500,000				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 12,862,430,631	Rp 5,000,000,000	Rp 2,832,828,000	Rp 3,580,000,000	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 1,000,000,000	Rp 5,000,000,000	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	7,500,000,000	Rp 7,500,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	Rp 11,232,000,000	0	Rp 332,828,000	Rp 1,080,000,000	-	
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ke tiga	Rp 630,430,631	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 20,502,104,638	Rp 5,756,405,137	Rp 21,880,909,528	Rp 17,362,292,233	Rp -	Rp 5,203,769,206
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp 10,751,905,137	24,713,737,528	Rp -	Rp -	Rp 12,703,769,206	Rp 11,001,821,978

Sumber: Hasil Analisis BAPPEKOT, 2015

Berkaca kepada pendapatan dan belanja daerah Kota Ambon, maka keuangan daerah Kota Ambon pada tahun 2016, direncanakan mengalami surplus sebesar Rp.12.703.769.206,-. Sedangkan untuk prakiraan maju tahun 2017, juga mengalami surplus sebesar Rp.5.798.052.772,-.

Selain pendapatan dan belanja daerah, keuangan daerah Kota Ambon juga menampung pembiayaan daerah. Pada tahun 2016 dan 2017, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, yaitu direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,- pada tahun 2016, dan sebesar Rp.12.703.769.206,- pada tahun 2017. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 dan 2017, direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Maluku, yaitu masing-masing sebesar Rp.7.500.000.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.0,-, dan tahun 2017 sebesar Rp.5.203.769.206,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Kebijakan keuangan daerah Kota Ambon untuk tahun 2015 tetap diarahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah, termasuk pembiayaan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Ambon yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkatkan setiap tahun.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Ambon, antara lain:

- a. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan public, khususnya pelayanan perizinan secara lebih efektif dan efisien, sebagai kompensasi bagi pengguna jasa pelayanan terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi,

maupun Pemerintah Pusat, dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat.

- e. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem Pelayanan Satu Atap, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- f. Mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah, dan Retribusi daerah.

Pendapatan daerah Kota Ambon Tahun 2016 (**Tabel III.2**), direncanakan sebesar Rp.1.172.167.934.194,- yang mengalami kenaikan sebesar 16% dari tahun 2015.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.141.471.766.906,- atau meningkat 43% dari anggaran tahun 2015.

- 1) Pajak Daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.77.405.632.383,- atau mengalami kenaikan sebesar 45% dari tahun 2015. Kenaikan pajak daerah juga terjadi akibat pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan dari Dana Perimbangan ke jenis penerimaan Pajak Daerah, yang telah mulai berlaku efektif sejak tahun 2014.
- 2) Retribusi Daerah meliputi imbalan atas pemakaian atau pemanfaatan jasa pelayanan Pemerintahan Kota Ambon, berupa fasilitas jasa pelayanan umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Izin Mendirikan Bangunan, retribusi di pelayanan persampahan, dan lain-lain. Retribusi daerah pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.48.078.627.576,- atau mengalami kenaikan sebesar 45% dari tahun 2015.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku, serta kontribusi dari PDAM Ambon dan PT. DSA. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ini pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp.1.549.000.000,- atau sama dengan tahun 2015.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi jenis penerimaan tertentu yang belum ditampung dalam salah satu bagian Pendapatan Asli Daerah, meliputi jasa giro, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jasa sewa, serta penyeteroran kembali Kas di tangan bendaharawan setelah akhir tahun anggaran. Lain-lain pendapatan asli daerah ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.14.438.506.948,- atau mengalami kenaikan sebesar 30% dari tahun 2015.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2016, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.797.808.839.580,- atau meningkat 13% dari tahun 2015.

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumberdaya Alam meliputi penerimaan bagi hasil PBB, khususnya penerimaan Bagi Hasil PBB Migas, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, provisi sumberdaya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, dan penerimaan dari sector pertambangan dan minyak bumi. Dana ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.38.451.304.080,- atau bertambah sebesar 25% dari tahun 2015.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan, dengan memperhatikan potensi luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB, Indeks Konstruksi Kemahalan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil. Dana ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.682.687.269.000,- atau meningkat sebesar 10% dari tahun 2015.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Non Reboisasi, maupun DAK bidang pendidikan, bidang kesehatan pelayanan dasar dan farmasi, bidang infrastruktur jalan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang

lingkungan hidup, bidang keluarga berencana, bidang transportasi darat, bidang perdagangan untuk pasar, serta bidang prasarana pemerintahan. Dana ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.76.670.266.500,- atau meningkat sebesar 35% dari tahun 2015.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pos yang menampung jenis penerimaan tertentu, yang bersumber dari Pemerintahan Atasan, meliputi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berupa penerimaan PKB, BBN-KB, dan PBB-KB; serta dana penyesuaian berupa tambahan tunjangan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru. Dana ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.232.887.327.707,- atau meningkat sebesar 16% dari tahun 2015.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada sisi lain, belanja daerah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Kota Ambon Tahun 2016 (**Tabel III.2**), direncanakan sebesar Rp.1.159.464.164.988,- yang mengalami kenaikan sebesar 13% dari tahun 2015.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.734.464.164.988,- atau meningkat sebesar 4% dari tahun 2015.

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai kontrak dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru; tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi; serta penunjang operasional, upah pungut PBB, dan insentif pajak dan retribusi. Selain itu, belanja ini digunakan pula untuk belanja representatif dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, serta tunjangan walikota dan wakil walikota. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.714.333.648.099,- atau meningkat sebesar 4% dari tahun 2015.
- 2) Belanja Subsidi dialokasikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.123.400.000,- atau sama dengan tahun 2015.
- 3) Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian uang atau barang dari Pemerintah Kota kepada masyarakat/ lembaga secara tidak wajib dan terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- atau sama dengan tahun 2015.
- 4) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat dan keluarga, yang bertujuan melindungi kemungkinan terjadi resiko berupa rehabilitasi social, perlindungan social, jaminan social, penanggulangan kemiskinan, dan bencana alam. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.915.060.100,- atau sama dengan tahun 2015.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk kebutuhan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Raja, Alokasi Dana Desa yang diperuntukan pembangunan desa, dan bantuan kepada partai politik. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.7.092.056.789 atau sama dengan tahun 2015.
- 6) Belanja tidak terduga diperuntukan bagi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan bencana social yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- atau sama dengan tahun 2015.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja ini dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja Langsung pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.425.000.000.000,- atau meningkat sebesar 34% dari tahun 2015.

- 1) Belanja pegawai diarahkan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan tenaga ahli dan narasumber, uang lembur, kontribusi pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- atau meningkat sebesar 83% dari tahun 2015.
- 2) Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menyediakan perlengkapan penunjang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintahan, berupa administrasi perkantoran, pencetakan dan penggandaan; pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan; pemeliharaan kendaraan bermotor; makan dan minum; serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.210.000.000.000,- atau meningkat sebesar 32% dari tahun 2015.
- 3) Belanja modal diperuntukan bagi pembelian atau pengadaan pembangunan asset tetap berwujud, dimana nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Belanja ini dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringannya, air bersih, serta asset tetap lainnya. Belanja ini pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.210.000.000.000,- atau meningkat sebesar 31% dari tahun 2015.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan digunakan pula untuk menampung transaksi keuangan guna menutupi defisit antara anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau pemanfaatan dana apabila terjadi surplus anggaran dan merealisasikan pengeluaran pembiayaan yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Ambon.

Pada tahun 2016, pendapatan daerah dan belanja daerah direncanakan mengalami surplus sebesar Rp.12.703.769.206,-. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 direncanakan dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sebesar Rp.7.500.000.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Maluku, sebesar Rp.7.500.000.000,-. Dengan demikian pembiayaan netto pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.0,-. Dengan demikian, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 2016 sebesar Rp.12.703.769.206,-.